



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT**

Oleh

RESTYA OKTARINA

06151088

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat - Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

**PADANG
2010**



No. Alumni Universitas

**RESTYA
OKTARINA**

No. Alumni Fakultas

BIODATA

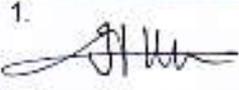
a)Tempat/tanggal lahir : Padang/29 Oktober 1988 b) Nama Orang Tua : Tamsir Bakti Utomo,SPd dan Endah Purwaning Rahayu,Amd c)Fakultas : Ekonomi
d)Jurusan : Ilmu Ekonomi e)NO BP : 06151088 f)Tanggal Lulus : 24 Agustus 2010
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h)IPK : 3,29 i)Lama Studi : 4 Tahun
h)Alamat Orang Tua : Jl.Merpati IV No.11 Komp.Pondok Permai Gadut, Padang

ANALISIS KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT*Skripsi S1 oleh Restya Oktarina Pembimbing Drs.Lukman,MSi***Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang kondisi dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 07 dan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneq PDT) Nomor 001 terdapat 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut adalah faktor geografis, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kemiskinan, sarana dan prasarana yang terbatas, daerah rawan bencana dan konflik sosial serta efek kebijakan pembangunan yang tidak tepat. Metodologi yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah Metode *Location Quotient (LQ)* dan Analisis SWOT. Berdasarkan pembahasan dengan menggunakan Metode LQ dan Analisis SWOT maka kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan daerah tertinggal adalah pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 24 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2.	3.
Nama Terang	Drs.Lukman, MSi	Drs. Yusrizal Yulius, MA	Dra, Wahyuni Eloisa Marinda, ME

Mengetahui,
Ketua JurusanProf.Dr.H.Firwan Tan,SE.M.Ec.DEA.Ing

NIP: 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama		Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama		Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan dilaksanakan di setiap wilayah dengan mendasarkan pada rasa keadilan, namun masalah ketimpangan antar wilayah masih juga terjadi dan saat ini merupakan masalah yang cukup serius. Upaya pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal terus dilakukan dan telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal tersebut (Bapeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 2006).

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk kementerian baru yaitu: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pembentukan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Kabinet Indonesia Bersatu merupakan salah satu wujud komitmen dan wujud nyata keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun daerah tertinggal demi tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dimana kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Tugas Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal adalah membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Yang dimaksud Daerah Tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Keteringgalan daerah dimaksud dapat berupa keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya (Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,2007) .

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 dan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 Tahun 2005, telah ditetapkan sebanyak 199 kabupaten diseluruh Indonesia yang tersebar di 32 propinsi masuk kriteria sebagai daerah tertinggal. Dimana 9 kabupaten yang termasuk kriteria sebagai daerah tertinggal tersebut terdapat di Propinsi Sumatera Barat, 9 Kabupaten tersebut yaitu:

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kabupaten Solok
3. Kabupaten Solok Selatan
4. Kabupaten Dharmasraya
5. Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Pasaman Barat
8. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat adalah faktor geografis, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kemiskinan, sarana dan prasarana yang terbatas, daerah rawan bencana dan konflik sosial dan efek kebijakan pembangunan yang tidak tepat.
2. Permasalahan yang dihadapi pada daerah tertinggal di Sumatera Barat berdasarkan pembahasan pada BAB IV adalah masih banyaknya daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan yang sulit ditempuh dengan menggunakan kendaraan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, sarana dan prasarana yang terbatas seperti pada Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sendiri dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2007 yang memiliki IPM 67,72 yang berada dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 yaitu 72,23
3. Dengan menggunakan Metode LQ maka didapat beberapa sektor unggulan/basis sesuai dengan hasil perhitungan diatas, seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki nilai LQ 1,15 untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Adrimas. 1993. *Ekonomi Pembangunan*. Pusat Studi Antar Universitas (PAU), Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Anderson JR. 1997. *Reconsidering Agricultural Extension*. The World Bank Observer, Vol. 12, No. 2, August 1997: 249-259.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, 2008. *Sumatera Barat Dalam Angka 2008*. BPS Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2008. *Padang Pariaman Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Padang Pariaman, Pariaman.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2008. *Kabupaten Solok Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Kabupaten Solok, Arosuka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan, 2008. *Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Solok Selatan, Padang Aro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2008. *Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Dharmasraya, Pulau Punjung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2008. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Painan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2008. *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, 2008. *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pasaman Barat, Simpang Empat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 2008. *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Muaro Sijunjung.